

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan telah menjadi masalah di Indonesia, masalah kemiskinan sangat penting yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah. Banyak program dari pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan salah satunya yaitu melalui perlindungan sosial bagi rakyat miskin. Kegiatan perlindungan sosial tersebut adalah bantuan PKH, dimana Program Keluarga Harapan (PKH) ini manifestasi dari kebijakan pengurangan kemiskinan, oleh karena itu kemiskinan menjadi salah satu masalah dimana seseorang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya adalah bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial merupakan bentuk intervensi negara untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin serta kelompok rentan. Program ini sangat penting, terlebih di wilayah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, pekerjaan informal, dan usaha kecil. Melalui program bantuan sosial, pemerintah berupaya memberikan perlindungan sosial, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta mendorong pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang bersifat sementara maupun berkelanjutan guna mencegah terjadinya risiko sosial. Dengan demikian,

keberadaan bantuan sosial merupakan salah satu wujud komitmen negara dalam menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, penyaluran bantuan sosial masih sering menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun hasil kajian akademik menunjukkan bahwa permasalahan yang kerap muncul antara lain data penerima yang tidak valid, adanya penerima ganda, distribusi yang tidak merata, keterlambatan penyaluran, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pendataan (BPK RI, 2020). Hal ini berimplikasi pada tidak optimalnya bantuan sosial dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas program pun menjadi dipertanyakan karena masyarakat yang benar-benar berhak terkadang tidak menerima, sementara masyarakat yang relatif mampu justru terdaftar sebagai penerima (Maun, 2020; Rosadi, 2021).

Kondisi tersebut sejalan dengan laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Data yang kurang akurat mengakibatkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran (Kementerian Sosial RI, 2021). Di beberapa daerah, terdapat kasus di mana bantuan sosial diterima oleh aparatur desa atau masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah, sedangkan masyarakat miskin yang sangat membutuhkan justru tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran, tetapi juga pada mekanisme distribusi, ketepatan sasaran, dan kualitas pendataan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang masih bergantung pada berbagai bentuk bantuan sosial pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di HSU pada November 2024 tercatat sebesar 5,75% dari total penduduk (BPS HSU, 2024; Katadata, 2024). Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan menjadikan bantuan sosial sebagai program yang strategis dan sangat dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih sering muncul keluhan terkait ketidaktepatan sasaran penerima maupun keterlambatan penyaluran.

Secara lebih spesifik, penelitian ini difokuskan pada Desa Hulu Pasar. Pemilihan di desa tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, desa tersebut merupakan wilayah dengan jumlah penerima bantuan sosial yang relatif tinggi karena sebagian besar warganya termasuk kelompok berpenghasilan rendah (BPS HSU, 2024). Kedua, terdapat laporan dan keluhan masyarakat mengenai penyaluran bantuan sosial di desa tersebut, antara lain terkait penerima yang tidak sesuai kriteria, keterlambatan distribusi, serta kurangnya transparansi dalam proses pendataan. Ketiga, desa tersebut memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda, desa yang berada lebih dekat ke pusat pemerintahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyaluran bantuan sosial di kecamatan amuntai tengah.

Efektivitas penyaluran bantuan sosial tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana atau barang kepada masyarakat, tetapi juga dari

ketepatan sasaran, transparansi, serta dampak yang dirasakan masyarakat penerima. Dalam perspektif administrasi publik, efektivitas kebijakan publik dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas penyaluran bantuan sosial menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan kredibilitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik. Jika penyaluran bantuan tidak efektif, maka tujuan program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika penyaluran bantuan berjalan efektif, maka masyarakat penerima dapat merasakan manfaat secara optimal, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, serta ketimpangan sosial dapat diminimalisasi (Rosadi, 2021).

1. Akurasi data dan penerima bermasalah seperti warga yang sudah mampu masih menerima, keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik (misalnya, memiliki usaha yang maju atau aset kendaraan). Permasalahan utama yang sering terjadi dalam program bantuan sosial adalah akurasi data dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Masih banyak ditemukan kasus di mana warga yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi masih tercatat sebagai penerima. Misalnya, terdapat keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik, seperti memiliki usaha yang sudah maju atau memiliki aset seperti kendaraan pribadi, namun tetap menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan pemutakhiran informasi penerima bantuan belum berjalan dengan baik dan menyeluruh. Akibatnya,

bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan bisa mengurangi kesempatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. *(Sumber dari kantor desa hulu pasar)*

2. Kurangnya dampak pada kemandirian ekonomi seperti dana bersifat konsumtif, dana PKH yang diterima cenderung habis untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, bukan diinvestasikan untuk pendidikan anak atau alokasi sebagai modal usaha produktif. Masalah berikutnya adalah kurangnya dampak positif dari program bantuan terhadap peningkatan kemandirian ekonomi keluarga penerima. Bantuan yang diberikan, seperti dana dari Program Keluarga Harapan (PKH), sering kali bersifat konsumtif. Dana yang diterima cenderung langsung habis untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari, seperti membeli makanan, membayar tagihan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan tersebut jarang sekali digunakan untuk keperluan yang lebih produktif dan berjangka panjang, seperti diinvestasikan untuk pendidikan anak atau dialokasikan sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini membuat keluarga penerima tetap bergantung pada bantuan dan tidak mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan. *(Sumber observasi di desa hulu pasar)*
3. Masalah penyaluran dana praktik di lapangan seperti dana sering kali tidak tepat waktu sesuai kebutuhan mendesak masyarakat, keterlambatan ini membuat tujuan utama sebagai bantuan cepat menjadi tidak tercapai. Selain masalah data dan penggunaan dana, kendala juga muncul pada aspek penyaluran dana di lapangan. Dalam praktiknya, dana bantuan sering kali tidak disalurkan tepat waktu, padahal masyarakat sangat membutuhkannya dalam kondisi mendesak. Keterlambatan penyaluran ini menjadi masalah

serius karena bantuan seharusnya hadir sebagai solusi cepat terhadap kesulitan ekonomi yang dialami warga. Ketika bantuan tidak datang pada waktu yang dibutuhkan, maka tujuan utama dari program tersebut, yaitu memberikan bantuan secara cepat dan tepat guna, menjadi tidak tercapai. Hal ini tentu menurunkan efektivitas program dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan sosial yang ada. *(Sumber informasi dari masyarakat desa hulu pasar masalah penyaluran dana praktik di lapangan)*

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai **EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA HULU PASAR KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana bantuan sosial telah disalurkan secara efektif di desa tersebut, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang

peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan menurut Teori Edy Sutrisno (2018) yaitu:

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Hulu Pasar Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian efektivitas kebijakan publik terkait penyaluran bantuan sosial.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya partisipasi dalam memastikan transparansi dan ketepatan sasaran bantuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam kajian terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

